



**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DEMOKRATIS MELALUI
PEMBELAJARAN PPKn PADA SISWA KELAS XII**

Endrise Septina Rawanoko *¹, Wuri Wuryandani¹

¹Universitas Negeri Yogyakarta

¹Jl. Colombo No. 1, Depok, Sleman 55281, Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding Author. Email: endriseseptina@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pendidikan karakter demokratis pada siswa di SMAN 1 Kesamben Kabupaten Jombang melalui pembelajaran PPKn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data saat proses pembelajaran berlangsung. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari guru dan siswa di SMA Negeri 1 Kesamben Kabupaten Jombang. Data dokumentasi yang diperoleh peneliti berupa perangkat pembelajaran yang dimiliki guru yaitu RPP. Keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh melalui triangulasi teknik (observasi, wawancara, dan dokumentasi) dan pencocokan data dengan teori. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai karakter demokratis di masukkan guru melalui mata pelajaran PPKn dengan menggunakan metode diskusi. Sedangkan evaluasi dari penanaman karakter demokratis dilakukan dengan evaluasi tertulis dan tidak tertulis untuk melihat *moral knowing, moral feeling, and moral action*.

Kata Kunci: *pendidikan karakter demokratis, pembelajaran PPKn*

***THE IMPLEMENTATION OF DEMOCRATIC CHARACTER EDUCATION THROUGH
PANCASILA AND CIVIC IN GRADE XII***

Abstract

This research was aimed to explain the implementation of a democratic character education through Pancasila and civics in grade XII students of senior high school. This was a descriptive qualitative study. The research data were collected through observation, interview and documentation. The observation was used to obtain data during the learning process. Interview was used to obtain data from the teacher and students in Senior High School in Kesamben Jombang Regency. The document used as information research way a set of lesson plan. Data validity of this research was obtained through triangulations technique (observation, interview, and documentation) and data theory verification. Data analyses used were data reduction, data presentation, and data verification. This research showed that the implementation of a democratic character education through the Pancasila and civics in grade XII students of senior high school could be applied well using a discussion learning method. The evaluation for character democratic used written evaluation and non test evaluation for know a moral knowing, moral feeling, and moral action.

Keywords: *democratic character education, Pancasila and civic learning*

Pendahuluan

Pendidikan karakter saat ini dibutuhkan untuk meminimalisir kemerosotan moral anak didik. Pendidikan yang ada di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan dan masih jauh dari apa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (Presiden Republik Indonesia, 2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kemerosotan moral anak didik dapat dilihat dari fenomena tawuran antarpelajar yang semakin hari semakin marak, dan perilaku anarkisme yang semakin memecah belah Indonesia.

Merubah karakter anak didik membutuhkan pembiasaan yang secara terus menerus untuk mengoptimalkan hasil pendidikan karakter. Pendidikan karakter tidak terbentuk secara instan melainkan melalui proses yang panjang, untuk menghasilkan sikap yang positif dibutuhkan pembiasaan. Pembiasaan untuk berbuat baik, pembiasaan untuk berlaku jujur, pembiasaan untuk bersikap sopan, dan lain sebagainya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Anarkisme yang semakin marak terjadi akibat kurangnya implementasi karakter demokratis. Seharusnya hal ini dapat diminimalisir oleh pihak sekolah melalui pembelajaran PPKn untuk mengimplementasikan karakter demokratis sehingga dapat membekali siswa-siswi di SMA muatan karakter yang positif. Pendidikan karakter demokratis bagi siswa sangat dibutuhkan, karena muatan karakter demokratis merupakan suatu cara berpikir dan bertindak memiliki kedudukan yang sama antara hak dan kewajiban. Kivisto & Faist (2007, p. 51) dalam bukunya *Citizenship: Theory, and Transnasional Prospects* menyatakan bahwa *"The citizen in modern democracies has a right to participate political decision making*. Berdasarkan pada teori tersebut warganegara pada demokrasi modern memiliki hak untuk membuat keputusan pada partisipasi politik. Demokrasi pada saat ini meletakkan partisipasi warga negara pada konten sebagai hak warga negara bukan kewajiban warga negara, sehingga dengan demikian negara harus bekerja lebih

giat untuk membuat warga negara turut berpartisipasi dalam demokrasi.

Pendidikan karakter di lingkungan sekolah dapat diintegrasikan dalam proses belajar mengajar pada setiap mata pelajaran. Muatan pendidikan karakter dapat disesuaikan pada mata pelajaran. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang paling berkompeten untuk menyampaikan karakter demokratis, karena materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan dan dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari sehingga lebih mudah dipraktekkan (Kurniawan, 2013, p. 47).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah dipandang dapat menjadi wahana pembentuk karakter demokratis. Perilaku demokrasi di Indonesia masih banyak disalah artikan oleh mayoritas warga negara Indonesia. Demokrasi masih banyak dipahami sebagai kebebasan tanpa batas dalam bertindak dan berekspeksi tanpa menghiraukan hak-hak asasi orang lain. Sebagai sebuah bangsa yang didirikan dengan modal persamaan nasib serta cita-cita yang bersendikan pada nilai-nilai luhur yang terkristalkan ke dalam dasar negara Pancasila, demokrasi dapat menjadi pilar penjaga karakter Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan bahasa (Ubaidillah & Rozak, 2015, p. 8).

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dengan rakyat bebas menentukan pilihannya dan bebas menyuarakan pendapatnya. (Robinson, 1996, p. 623) menjelaskan: *"Since democracy is a universal aspiration and the claim to promote it has mass appeal, "democracy promotion" has a crucial ideological dimension"*. Demokrasi adalah aspirasi universal dan tuntutan untuk mempromosikannya memiliki daya tarik massa (masyarakat), promosi demokrasi sebagai dimensi ideologis yang penting. Berdasarkan pada teori Robinson bahwa demokrasi adalah suatu aspirasi masyarakat dan merupakan alat politik untuk menarik massa (masyarakat) pada suatu Pemilu.

Demokrasi di Indonesia sudah menjadi pilihan yang tepat, dibandingkan dengan sistem lainnya. Namun, demokrasi di Indonesia merupakan hal yang mahal karena suara rakyat bisa dibeli dengan uang. Hal ini semakin marak ketika diadakan Pilkada pada tahun 2015, karena rakyat Indonesia dapat menyuarakan pilihan kepada siapa mereka ingin dipim-

pin melalui Pilkada. Kasus yang menyita perhatian publik adalah dengan adanya kerusuhan saat kampanye terbuka yang diadakan pada hari Minggu, 22 November 2015. Kapolres Sleman AKBP Faried Zulkarnaen mengatakan, petugas telah mengamankan puluhan kayu, balok, dan senjata tajam saat kampanye terbuka. Selain itu, petugas juga mengamankan beberapa minuman beralkohol. Aksi anarkis yang dilakukan saat kampanye terbuka adalah perusakan dan penganiayaan mobil Toyota Yaris (Jawa Pos, Selasa 24 November 2015).

Menjelang Pilkada 2015 banyak kerusuhan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Anarkisme yang dilakukan oleh beberapa massa pendukung calon bupati merupakan salah satu dampak negatif yang dapat merugikan orang lain. Sementara itu, menjelang pilkada di Sleman Polisi intensifkan razia pada Jum'at, 27 November 2015. Kapolres Sleman, AKBP Faried Zulkarnain mengatakan razia ini dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya kericuhan antarpemilihan karena pengaruh miras selama proses pilkada. Razia juga dilakukan agar Sleman tetap dalam keadaan kondusif. Pengungkapan kasus peredaran juga terjadi di wilayah Godean (Tribun Jogja, Jum'at 27 November 2015).

Sementara itu aksi anarkisme di Jombang kembali terjadi. Siswa STM YP 17 Jombang menyerang siswa MAN 3 Jombang. Puluhan siswa STM YP 17 Jombang ini menyerang melalui pintu belakang sekolah MAN 3 Jombang, akibatnya sebanyak 4 siswi MAN 3 Jombang langsung pingsan (Memo Timur On Line, 31 Januari 2015).

Pentingnya pendidikan karakter demokratis sangat berhubungan dengan partisipasi masyarakat pada kegiatan politik. Melalui kegiatan politik seperti pemilihan umum maka masyarakat dapat menyuarakan pendapatnya melalui hak pilih. Biesta (2011, p. 1) menyampaikan bahwa *"learning and democratic citizenship from this wider angle, emphasizing the importance of the democratic quality of the processes and practices that make up the everyday lives of children, young people and adults for there on going formation as democratic citizens. In other word democracy is learned in school and in society."*

Berdasarkan penjelasan Biesta pembelajaran dan warga negara demokratis dari sudut pandang yang lebih luas, menekankan pentingnya kualitas demokratis dari proses dan

praktek yang membentuk kehidupan sehari-hari pada anak-anak, pemuda dan orang dewasa untuk menunjukkan pembentukan sebagai warga negara demokratis. Dengan kata lain, demokrasi dipelajari di sekolah dan masyarakat. Warga negara dapat mempelajari demokrasi baik di sekolah dan masyarakat melalui proses dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Karakter demokratis sebagai pendukung dalam kegiatan politik agar masyarakat bisa memiliki sikap positif pada kegiatan pemilu. Pada siswa kegiatan politik dimulai saat mereka melakukan pemilihan ketua OSIS, dan akan berlanjut saat mereka menginjak pada usia 17 tahun, yaitu saat mereka menginjak kelas XII SMA, diusia itu siswa dapat menyuarakan hak pilih mereka dalam Pemilu.

Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah suatu jenjang pendidikan formal yang ada di Indonesia. Umumnya pelajar SMA berusia antara 16-18 tahun. Pada usia 17 tahun siswa bisa memberikan aspirasi saat Pemilu maupun Pilkada, karena pada usia 17 tahun seluruh penduduk Indonesia memiliki hak untuk memilih. Dengan adanya hak pilih maka siswa bisa memilih calon legislatif ataupun calon presiden yang mereka inginkan. Pada akhirnya akan ada calon terpilih dan tidak terpilih, ketika pilihan mereka tidak terpilih maka akan rentan adanya protes yang dipicu dengan perpecahan. Untuk itu para siswa-siswi di SMA khususnya pada kelas XII harus dibekali dengan pendidikan yang dapat memunculkan nilai-nilai demokrasi mereka agar mereka tidak mudah terpecah dengan adanya perbedaan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah salah satu pelajaran yang dapat menumbuhkan nilai-nilai demokrasi karena pada mata pelajaran ini banyak muatan yang positif mengenai warga negara yang baik, demokrasi, rasa cinta tanah air, juga hak dan kewajiban sebagai warga negara. Aziz & Sapriya (2011, p. 42) menegaskan proses pendidikan demokrasi yang sangat strategis khususnya untuk generasi mendatang adalah melalui proses pembelajaran di lingkungan masyarakat sekolah. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran yang dirancang untuk membekali siswa-siswi agar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Melalui pembelajaran PPKn, siswa-siswa dipersiapkan untuk dapat berperan aktif sebagai warga negara dengan hak dan kewajiban-

nya dan menjadi warga negara yang mempunyai rasa demokrasi dan toleransi yang tinggi karena Indonesia merupakan negara kesatuan yang majemuk dan terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat.

Dalam masyarakat demokratis, semua masyarakat memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Dalam konteks pendidikan nasional, PPKn dijadikan sebagai wadah dan instrumen untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Bersandar pada ketetapan perundangan ini, keberadaan inovasi pendidikan demokrasi dan HAM yang dikemas dalam bentuk Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada dasarnya merupakan sebuah instrumen pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa: mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (Ubaidillah & Rozak, 2015, p. 4).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah merupakan salah satu sarana untuk membentuk siswa memiliki karakter demokratis. Bahmueller & Patrick (1999, p. 10) menyampaikan bahwa “*The first objective of education for democratic citizenship is to teach thoroughly what a democracy is, and what it is not.*” Tujuan pertama pendidikan untuk warga negara demokratis adalah untuk mengajarkan apa itu demokrasi dan apa yang bukan demokrasi. Jadi melalui PPKn adalah wadah yang dimiliki oleh guru untuk membekali siswa memiliki sikap demokratis sebelum siswa itu terjun di masyarakat. (Aziz & Sapriya, 2011, p. 35) menambahkan bahwa PPKn di Indonesia bertujuan untuk menghasilkan warga yang demokratis yaitu warga negara yang cerdas dan memanfaatkan kecerdasannya sebagai warganegara untuk kemajuan diri dan lingkungannya. Melalui pembelajaran PPKn dapat menghasilkan warga negara yang cerdas dalam berdemokrasi untuk kemajuan diri dan lingkungannya.

Sebagai wahana PPKn yang demokratis maka kurikulum dan pembelajaran pada PPKn memerlukan pembenahan untuk mengembangkan nilai-nilai positif yang ada pada sikap demokrasi. Guru sebagai tenaga pendidikan dalam melaksanakan tugas belajar meng-

ajar harus menguasai kompetensi dan aspek keilmuan sesuai dengan bidang mata pelajarannya masing-masing. Dalam bidang PPKn maka guru dituntut untuk menanamkan pilar-pilar kebangsaan pada anak didik.

Pentingnya pendidikan karakter demokratis bagi pelajar merupakan bagian integral dari PPKn, yang pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan individu menjadi warganegara yang cerdas dan baik (*smart and good citizens*). Bernstein (2008, p. 6) menyatakan “*As a society, we must learn how to inject politics with civility; failure to do so can have the effect of turning young people off to politics even more than they are today*”. Sebagai warganegara, kita harus mempelajari bagaimana cara berpolitik dengan kesopanan, kegagalan dalam melakukannya dapat menimbulkan efek balik pada anak-anak muda yang saat ini berada di dunia politik. Maka itu, internalisasi karakter demokrasi dalam pembelajaran PPKn di sekolah menuntut perubahan cara berpikir, terutama bagi para pengambil keputusan pendidikan di pusat dan di daerah dalam menyikapi dan memprogramkan pendidikan karakter demokrasi bagian integral dari PPKn dan proses demokratisasi secara keseluruhan. Secara tidak langsung memasukkan karakter demokratis pada pembelajaran PPKn akan mempengaruhi cara berpikir semua orang di lingkungan tersebut, baik itu guru, siswa, dan masyarakat luas.

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kesamben berada di Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur. Merupakan salah satu Sekolah yang sangat mendukung pengembangan karakter demokratis. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, siswa siswi di SMAN 1 Kesamben Kabupaten Jombang sangat aktif dalam berdemokrasi, contohnya pada pemilihan anggota OSIS. Pada saat pemilihan OSIS siswa siswi yang ada di SMAN 1 Kesamben Kabupaten Jombang tanpa adanya paksaan dan dengan kesadaran yang tinggi sebagai salah satu sarana melakukan pembiasaan dalam karakter demokrasi. Selain itu, karakter demokrasi dapat dilihat setelah adanya pemilihan anggota OSIS siswa siswi SMAN 1 Kesamben Kabupaten Jombang dapat menerima dengan lapang dada keputusan yang ada, baik menang ataupun kalah dalam berpartisipasi. Dapat dipastikan tidak ada pergolakan yang berarti di SMAN 1 Kesamben Ka-

bupaten Jombang setelah diadakannya pemilihan anggota OSIS.

Nilai-nilai demokrasi yang dimiliki oleh siswa-siswi SMAN Kesamben Kabupaten Jombang dapat dilihat melalui kegiatan yang ada di sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh seluruh atau sebagian peserta didik. Ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa-siswi SMAN Kesamben Kabupaten Jombang antara lain; paskibra, pramuka, PMR (Palang Merah Remaja), karawitan, sepak bola, basket, menari, paduan suara, dan jurnalistik. Ekstrakurikuler yang ada di sekolah menjembatani apresiasi siswa-siswi agar dapat mewedahi bakat-bakat yang dimiliki, selain itu berbagai macam ekstrakurikuler adalah wujud sekolah yang demokratis karena memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk memilih apa yang mereka inginkan.

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kesamben Kabupaten Jombang menjembatani kegiatan demokrasi dalam pemilihan OSIS. Untuk menyuarkan hak pilihnya pada pesta demokrasi baik itu Pemilu maupun Pilkada seorang pemilih harus berusia 17 tahun. Usia 17 tahun pada tingkat sekolah yaitu pada jenjang pendidikan di SMA yang berada pada kelas XII, untuk itu siswa siswi di SMAN 1 Kesamben Kabupaten Jombang perlu pendidikan karakter demokratis yang lebih intensif agar pada saat Pemilu mereka tidak terjerumus dalam kerusuhan kampanye menjelang Pemilu, maupun pasca Pemilu.

Pada masyarakat luas pesta demokrasi merupakan suatu ajang aspirasi rakyat dalam menyuarkan pilihannya melalui Pemilu. Kerusuhan kampanye menjelang Pemilu sering mewarnai pesta demokrasi di masyarakat. Salah satu cara untuk meminimalisir adanya kerusuhan saat kampanye baik menjelang Pemilu maupun setelah Pemilu maka dibutuhkan pendidikan karakter demokratis. Pendidikan karakter demokratis yang lebih intensif diberikan pada siswa siswi SMA khususnya pada kelas XII, karena pada saat siswa-siswi kelas XII memiliki usia 17 yang memiliki hak untuk memilih atau menyuarkan pendapatnya saat pemilu berlangsung. Tujuan pendidikan karakter demokratis diberikan pada peserta didik tidak hanya untuk membekali saat Pemilu dan politik saja, akan tetapi karakter demokratis juga dibutuhkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi karakter

demokratis melalui pembelajaran PKn kelas XII di SMA, sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan implementasi karakter demokratis melalui pembelajaran PKn kelas XII di SMA.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifat dan tujuannya merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Sugiyono, 2014, p. 6). Penelitian deskriptif ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Penelitian kualitatif deskriptif suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran seseorang secara individual maupun kelompok.

Penelitian deskriptif kualitatif bersifat induktif dimana peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk diinterpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan yang lengkap mendukung data yang diperoleh. Mengungkap gejala-gejala yang ada yang mendeskripsikan implementasi karakter demokratis melalui pembelajaran PKn di kelas XII SMA

Penentuan tempat lokasi ini didasarkan pada alasan bahwa di SMAN 1 Kesamben Jombang yang berada di Jombang memiliki karakter demokrasi yang lebih unik dari pada sekolah lainnya, peserta didik aktif dan berani menyampaikan pendapat dari pada di sekolah lain.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan April 2016. Pengumpulan data menggunakan; wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber dan metode, diskusi ahli, dan pencocokan data dengan teori. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi karakter demokratis melalui ma-

ta pelajaran PKn yang di lakukan pada kelas XII SMAN 1 Kesamben Jombang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Pertama, dilakukan melalui pembelajaran PKn yang tertuang dalam RPP. Kedua, dilakukan dalam proses pembelajaran disekolah baik di dalam kelas maupun diluar kelas.

Pada pelaksanaan pembelajaran metode pembelajaran yang digunakan oleh guru PPKn adalah diskusi, diskusi adalah cara efektif memunculkan sikap demokratis pada siswa. Metode diskusi adalah cara metode pembelajaran dimana siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Proses belajar mengajar terjadi pada saat diskusi berlangsung yaitu saat interaksi antara dua atau lebih yang terlibat, saling tukar menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah.

Pada dasarnya penggunaan metode pembelajaran tidak hanya diskusi saja, banyak metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk menumbuhkan nilai-nilai demokrasi seperti (1) metode proyek; (2) metode eksperimen; (3) metode tugas dan resitasi; (4) metode sosiodrama; (5) metode demonstrasi; (6) metode problem solving (7) metode karyawisata; dan (8) metode latihan (Djamarah & Zain, 2013, p. 7).

Pada implementasi pendidikan karakter demokratis melalui pembelajaran PPKn pada siswa kelas XII di SMA tidak hanya metode saja yang berpengaruh dalam menumbuhkan nilai-nilai demokrasi, namun guru adalah komponen terpenting. Guru dituntut untuk dapat melakukan tiga hal yaitu: (1) kemampuan membuka dan menutup pelajaran, (2) kemampuan menjelaskan materi pelajaran, (3) kemampuan memotivasi peserta didik agar berani bertanya (Suyadi, 2013, p. 19). Ketiga kemampuan dasar diatas dapat dipraktikkan oleh guru dalam pembelajaran sehingga guru dapat terampil untuk menerapkan pembelajaran berkarakter.

Pendidikan karakter demokratis dibutuhkan, ada 3 pendekatan di sekolah untuk mendidik warga negara yang demokratis, dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

“(1) The first approach utilises citizenship theory that argues citizenship is a legal status of rights and responsibilities in a democratic system. (2) A second approach contends that citizenship is about active

participation within societal structures and processes, such as voting and engaging in civic activities in the context of a democracy. (3) Third, citizenship is more about supporting participation of all people in a democracy, Print (2008).”

Penjelasan Print mengkategorikan tiga pendekatan di sekolah untuk mendidik warga negara yang demokratis yaitu: (1) Pendekatan pertama menggunakan teori kewarganegaraan bahwa kewarganegaraan adalah status hukum hak dan tanggung jawab sebagai warganegara dalam sistem demokrasi. Sehingga pendidikan kewarganegaraan demokrasi harus mempersiapkan cara untuk memahami dan bertindak atas hak dan tanggung jawab sebagai warganegara. (2) Teori kedua berpendapat bahwa kewarganegaraan adalah tentang partisipasi aktif dalam masyarakat dalam kegiatan sipil dalam konteks dari demokrasi, sehingga pendidikan untuk kewarganegaraan aktif memerlukan keaktifan dalam partisipasi masyarakat maupun pemerintahan. (3) Teori ketiga berpendapat bahwa kewarganegaraan adalah bagaimana cara mendukung partisipasi semua orang dalam demokrasi, di mana warganegara mengejar keadilan social untuk mengubah kehidupan di masyarakat.

Berdasarkan RPP yang dibuat oleh guru kegiatan inti pembelajaran menggunakan diskusi kelas. Proses pembelajaran PPKn yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan dengan cara diskusi di kelas sehingga memunculkan hak dan tanggung jawab sebagai warganegara dalam sistem demokrasi, sehingga siswa-siswi bertindak atas hak dan tanggung jawab sebagai warganegara yang baik, selain itu memunculkan partisipasi aktif dalam berpendapat. Djamarah & Zain (2013, p. 13) menjelaskan bahwa metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran, di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Proses belajar mengajar terjadi, interaksi antara dua atau lebih yang terlibat, saling tukar menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah.

Implementasi pendidikan karakter demokratis dibentuk untuk menumbuhkan nilai-nilai demokrasi, yang meliputi nilai-nilai demokrasi adalah toleransi, bebas mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat, me-

mahami keanekaragaman dalam bermasyarakat, terbuka dalam berkomunikasi, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, percaya diri atau tidak menggantungkan diri pada orang lain, saling menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan, dan keseimbangan (Zamroni, 2001, p. 32). Untuk menumbuhkan karakter demokratis maka dibutuhkan suatu pengetahuan moral, perasaan moral, dan aksi moral. Lickona (1991, p. 53) menjelaskan:

“components of good character is: (1) moral knowing (moral awareness, knowing moral values, perspective-taking, moral reasoning, decision-making, dan self-knowledge); (2) moral feeling (conscience, self esteem, empathy, loving the good, self-control, humility); and (3) Moral action (competence, will, habit).”

Komponen karakter yang baik yaitu: (1) pengetahuan moral (kesadaran moral, mengetahui nilai-nilai moral, mengambil sudut pandang, penalaran moral, pengambilan keputusan, pengetahuan tentang diri sendiri); (2) perasaan tentang moral (hati nurani, harga diri, empati, mencintai kebaikan, pengendalian diri, kerendahan hati); (3) tindakan moral (kompetensi, keinginan, kebiasaan). Pengetahuan moral yang merupakan kesadaran tentang moral, pengetahuan nilai-nilai moral, serta sudut pandang moral yang menjadi tolak ukur baik tidaknya perilaku. Sedangkan perasaan moral yang merupakan hati nurani, empati, mencintai kebaikan, dan pengendalian diri mengantarkan diri memiliki hati nurani yang baik dan pada akhirnya akan melakukan tindakan moral yang baik. Untuk menumbuhkan *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action* maka dibutuhkan adanya strategi untuk mengintegrasikan dalam karakter siswa.

Lickona (1997, pp. 66-76) menambahkan komponen di kelas dalam membentuk pendidikan karakter, sebagai berikut:

“Classroom components are: (1) The teacher as caregiver, moral, model, and moral mentor. (2) Creating a caring classroom community. (3) Moral discipline. (4) Creating a democratic classroom environment. (5) Teaching values through the curriculum. (6) Cooperative learning. (7) The conscience of craft. (8) Ethical reflection. (9) Teaching conflict resolution.”

Komponen dalam membentuk pendidikan karakter di ruang kelas yaitu: (1) guru sebagai pengasuh, moral, model, dan mentor moral; (2) menciptakan kelas yang peduli pada kelompoknya; (3) disiplin moral; (4) menciptakan lingkungan kelas yang demokratis; (5) mengajarkan seluruh nilai pada kurikulum; (6) pembelajaran secara kerja sama; (7) menggunakan hati nurani; (8) merenungkan etika; (9) mengajarkan penyelesaian konflik. Komponen dalam membentuk pendidikan karakter di ruang kelas ada 9 yang menitik beratkan peran guru sebagai pengasuh moral, model, dan mentor moral. Guru dituntut untuk menciptakan kelas yang demokratis melalui pengajaran nilai dan pembelajaran kerjasama dan mengajarkan penyelesaian konflik.

Penerapan pendidikan karakter dapat dilakukan dengan berbagai strategi pengintegrasian, berdasarkan hasil wawancara guru melakukan strategi keteladanan, kegiatan spontan, teguran, dan pengkondisian lingkungan untuk pengintegrasian nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh pendapat (Muslich, 2011, pp. 175-176) yang menjelaskan ada 5 macam strategi yaitu dalam kegiatan sehari-hari sebagai berikut: (1) keteladanan atau contoh; (2) kegiatan spontan; (3) teguran; (4) pengkondisian lingkungan; dan (5) kegiatan rutin.

Pendidikan karakter di sekolah sebagai pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan pada suatu nilai tertentu. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang terintegrasi dengan pembelajaran yang terjadi pada semua pelajaran. Hal ini bertujuan untuk penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh. Penguatan dan pengembangan perilaku didasari oleh nilai yang dirujuk oleh sekolah (Kesuma, Triatna, & Permana, 2013, pp. 5-6). Sekolah merupakan tempat bagi siswa untuk mendapatkan penguatan dan pengembangan perilaku didasari oleh nilai seperti penjelasan (Lickona, 1991, p. 102) bahwa:

“There are least ten good reasons why schools should be making a clearheaded and wholehearted commitment to teaching moral values and developing good character: (1) There is a clear and urgent need. (2) Transmitting values is and always has been the work of civilization. (3) The school’s role as moral educator becomes even more vital at a time when

millions of children get little moral teaching from their parents and when value-centered influences such as church or temple are also absent from their lives. (4) There is common ethical ground even in our value-conflicted society. (5) Democracies have a special need for moral education, because democracy is government by the people themselves. (6) There is no such thing as value-free education. (7) Moral questions are among the great questions facing both the individual person and the human race. (8) There is broad-based, growing support for values education in the schools. (9) An unabashed commitment to moral education is essential if we are to attract and keep good teachers. (10) Values education is a double job."

Pada penjabaran Lickona ada 10 alasan positif mengapa sekolah harus mengajarkan nilai-nilai moral dan membangun karakter yang baik bagi anak didiknya. Sekolah harus berperan maksimal untuk memberikan pengajaran moral agar tidak terjadi kemerosotan nilai di masyarakat. Pendidikan karakter yang dilakukan oleh guru PPKn di SMA Negeri 1 Kesamben adalah menumbuhkan karakter demokratis melalui pembelajaran, agar mereka peduli terhadap hak-hak orang lain dan harus melaksanakan kewajibannya sebagai tanggung jawab warga negara yang demokratis.

Membangun karakter di sekolah bukan merupakan hal yang mudah, karena ini merupakan sebuah tantangan baru dalam dunia pendidikan. Karakter adalah ukuran utama dari seorang individu dan juga ukuran utama dari sebuah bangsa. Kesadaran dalam membangun karakter untuk mengajarkan nilai-nilai positif menjadi kebutuhan yang mendesak karena untuk merombak sebuah bangsa yang berkarakter maka dibutuhkan perombakan pada individunya yaitu melalui pendidikan.

Implementasi pendidikan karakter demokratis tidak hanya dapat diterapkan melalui pembelajaran di kelas saja, namun dapat diintegrasikan dalam budaya sekolah. Pengintegrasian budaya sekolah di SMAN Kesamben Kabupaten Jombang dapat dilihat melalui kegiatan yang ada di sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang diikuti oleh seluruh atau sebagian peserta didik. Ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa-siswi SMAN

Kesamben Kabupaten Jombang antara lain; paskibra, pramuka, PMR (Palang Merah Remaja), karawitan, sepak bola, basket, menari, paduan suara, dan jurnalistik.

Ekstrakurikuler yang ada di sekolah menjembatani apresiasi siswa-siswi agar dapat mewadahi bakat-bakat yang dimiliki, selain itu berbagai macam ekstrakurikuler adalah wujud sekolah yang demokratis karena memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk memilih apa yang mereka inginkan. Sesuai teori (Wibowo, 2012, pp. 83-91) Pengintegrasian pendidikan karakter dalam budaya sekolah yaitu: (1) Kelas; (2) Sekolah; (3) Luar sekolah yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang diikuti oleh seluruh atau sebagian peserta didik.

Implementasi pendidikan karakter demokratis dapat diterapkan melalui pembelajaran di kelas dan dapat diterapkan melalui budaya sekolah. Implementasi pendidikan karakter demokratis yang diterapkan melalui pembelajaran di kelas dapat diintegrasikan melalui pembelajaran PPKn. Sedangkan implementasi pendidikan karakter demokratis yang diterapkan melalui budaya sekolah salah satunya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan evaluasi yang dilakukan guru untuk melihat penerapan karakter disiplin dilakukan dengan menggunakan skala sikap. Ada tiga komponen sikap, yakni kognisi, afeksi, dan konasi. Kognisi berkenaan dengan pengetahuan seseorang tentang objek atau stimulus yang dihadapinya, afeksi berkenaan dengan perasaan dalam menanggapi objek tersebut, sedangkan konasi berkenaan dengan kecenderungan berbuat terhadap objek tersebut. Skala sikap dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden, apakah pernyataan itu didukung atau ditolakinya, melalui rentangan nilai tertentu. Sikap yang ditunjukkan oleh peserta didik di SMAN 1 Kesamben Jombang berkarakter demokratis sesuai dengan konasi yang mereka tunjukkan, seperti mampu mengeluarkan pendapat, protes atas kebijakan sekolah dan mampu menghargai sesama teman saat berdiskusi.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik simpulan bahwa implementasi karakter demokratis melalui pembelajaran PPKn kelas XII di SMAN 1 Kesamben Jombang menunjukkan hasil yang baik dan terlihat dari

sikap yang ditampilkan oleh para peserta didik di kelas XII. Penerapan karakter demokratis terlihat dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang di buat oleh guru dan pada saat proses pembelajaran. Sedangkan evaluasi dari atas penerapan karakter demokratis terlihat dari hasil tes tertulis dan tidak tertulis. Sikap demokratis terlihat saat di dalam kelas maupun diluar kelas. Di dalam kelas terlihat ketika berdiskusi dan berinteraksi dengan teman maupun guru, sedangkan di luar kelas seperti saat pelaksanaan ekstrakurikuler terlihat dari keaktifan peserta didik dan interaksi peserta didik dengan lingkungan dan pleatih ekstrakurikuler. Mereka menunjukkan sikap mampu mengeluarkan pendapat, memberikan saran atau masukan, bahkan protes dan menghargai pendapat orang lain.

Berdasarkan simpulan, penelitian ini memberikan saran kepada Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang lain untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi pada siswa seperti: (1) metode proyek; (2) metode eksperimen; (3) metode sosiodrama; (4) metode demonstrasi; (5) metode karyawisata; dan (6) metode latihan. Guru dapat menggunakan strategi-strategi tertentu dalam pendidikan karakter demokratis di kelas seperti: (1) penggunaan karya fiksi dan nonfiksi; (2) pengajaran empati; (3) diskusi dilema moral; (4) evaluasi diri; (5) keterampilan berpikir kritis; dan (6) keterampilan mengatasi konflik. Implementasi pendidikan karakter demokratis tergantung pada peran guru PPKn yang menerapkan secara langsung pada pembelajaran PPKn pada siswa kelas XII di sekolah. Maka, diharapkan kepala sekolah, guru, dan karyawan ikut membantu menerapkan karakter demokratis pada kehidupan sehari-hari di sekolah

Daftar Pustaka

- Aziz, A. & Sapriya. (2011). *Teori dan landasan pendidikan kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Bahmueller, C. F., & Patrick, J. J. (1999). *Principles and practices of democratic citizenship: Internasional perspektif and projects*. Indiana University. U.S. Departement Of Education: Education Resources Information Center (ERIC).
- Bernstein, L. J. (2008). Cultivating civic competence: simulations and skill building in an introductory government class. *Journal of Political Science Education*, 4(1), 1-20.
- Biesta, G. J. J. (2011). *Learning democracy in school and society*. Rotterdam/Boston/Taipei. Sense Publisher.
- Djamarah, S. B. & Zain, A. (2013). *Strategi belajar mengajar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kesuma, D., Triatna, C., & Permana, J. (2013). *Pendidikan karakter kajian teori dan praktik di Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kivisto, P., & Faist, T. (2007). *Citizenship: theory, and transnasionnal prospects*. Blackwell Publishing Ltd.
- Kurniawan, S. (2013). *Pendidikan karakter: konsepsi dan implementasinya secara terpadu di lingkungan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character how our schools can teach respect and responsibility*. New York, Toronto, London, Sydney, Auckland. Bantam Books.
- Lickona, T. (1997). The teacher's role in character education. *Journal of Education*, 179(2).
- Print, M. (2008). *Education for democratic citizenship in Australia*. The SAGE Handbook of Education for Citizenship and Democracy.
- Muslich, M. (2011). *Pendidikan karakter menjawab tantangan krisis multidimensional*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Presiden Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003).
- Robinson, I. W. (1996). Globalization, the world system, and "democracy promotion" in U. S. Foreign Policy. *Theory and Society*, 25(5), 615-665.

- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suyadi. (2013). *Strategi pembelajaran pendidikan karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ubaidillah, A., & Rozak, A. (2015). *Pendidikan kewarganegaraan (civic education) demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Wibowo, A. (2012). *Pendidikan karakter: strategi membangun karakter bangsa ber peradaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zamroni. (2001). *Pendidikan untuk demokrasi tantangan menjuj civil society*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.